

IMPLEMENTASI *DYNAMIC GOVERNANCE* SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN LAMONGAN

Cindy Dyah Ika Puspita¹⁾, Diana Hertati²⁾

¹²⁾Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Dynamic Governance* dalam percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan. Fokus kajian berada pada tiga kapabilitas utama, yaitu berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir lintas yang digunakan pemerintah daerah dalam merumuskan, menjalankan, serta menyesuaikan kebijakan penurunan stunting secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thinking ahead* terlihat melalui pemanfaatan data pemantauan tumbuh kembang anak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan jangka panjang. *Thinking again* tercermin pada mekanisme evaluasi rutin, forum refleksi, serta kemampuan menyesuaikan program berdasarkan kondisi di lapangan. Sementara itu, *thinking across* tampak jelas dalam penguatan kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah desa, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak swasta dalam penyediaan intervensi gizi dan edukasi masyarakat. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Dynamic Governance* berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka stunting secara efektif, terukur, dan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci: *Dynamic Governance*, Stunting, Kebijakan Publik.

Abstract

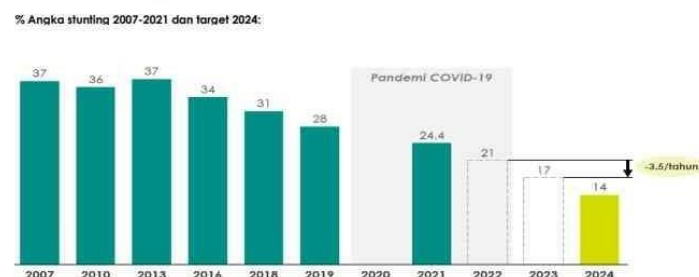
This study aims to analyze the application of *Dynamic Governance* principles in accelerating stunting prevention in Lamongan Regency. The focus of this research lies on three core capabilities, namely *thinking ahead*, *thinking again*, and *thinking across*, which guide the local government in formulating, implementing, and adjusting sustainable stunting reduction policies. This research employs a qualitative descriptive method through interviews, observations, and documentation in related agencies. The results of the study indicate that *thinking ahead* is reflected in the utilization of child growth monitoring data as the basis for long-term planning and policy formulation. *Thinking again* is shown through routine evaluation mechanisms, reflection forums, and the ability to adjust programs based on field conditions. Meanwhile, *thinking across* is demonstrated through strengthened cross-sector collaboration with village governments, health workers, educational institutions, community organizations, and private actors in providing nutritional interventions and community education. The study concludes that the implementation of *Dynamic Governance* contributes significantly to effective, measurable, and sustainable stunting reduction efforts in Lamongan Regency.

Keywords: *Dynamic Governance*, Stunting, Public Policy.

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi tantangan kesehatan global, di mana WHO memperkirakan pada tahun 2022 terdapat 45,05 juta anak mengalami gizi buruk, 37,0 juta kelebihan berat badan, dan 148,1 juta anak di bawah lima tahun mengalami stunting (Estimasi Gabungan UNICEF/WHO/Kelompok Bank Dunia Mengenai Kekurangan Gizi Pada Anak: Temuan Utama Edisi 2023, 2023). Dalam konteks kebijakan nasional, Perpres No. 72 Tahun 2021 mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan fisik akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 151 negara dan peringkat kedua di Asia Tenggara dalam prevalensi stunting (Shanti, 2022). Meski terjadi perbaikan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat angka stunting nasional sebesar 21,5%, turun dari 24,4% pada 2022 menurut SSGI, namun capaian tersebut dinilai masih belum sesuai target pemerintah (BKKBN: Penurunan Stunting 2023 Belum Menggembirakan, Di Bawah Target, 2024; Anjani et al., 2024).

Gambar 1. Angka Stunting 2007-2021 dan target 2024



Sumber: <https://www.kompasiana.com>

Meskipun angka stunting di Indonesia terus menurun, target prevalensi 14% pada tahun 2024 sebagaimana ambang batas WHO belum tercapai, sehingga penanganan stunting tetap menjadi program strategis nasional yang membutuhkan pendekatan terintegrasi. Upaya ini sejalan dengan agenda SDGs untuk menghapus kekurangan pangan dan defisiensi nutrisi pada tahun 2030 serta menurunkan prevalensi stunting hingga 40% pada 2025 (Haskas, 2020). Di Jawa Timur, intervensi pemerintah

menunjukkan hasil positif dengan penurunan prevalensi stunting menjadi 19,2% pada tahun 2022 berdasarkan SSGI, yang menandakan keberhasilan program percepatan penurunan stunting (Azaria, 2023). Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berfokus pada peningkatan kelahiran bayi sehat bebas stunting sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia, meskipun pencapaian target nasional Tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan implementasi di lapangan (Kemenko PMK, 2023).

Kabupaten Lamongan menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di Jawa Timur (Sakti et al., 2023), dengan prevalensi mencapai 27,05% pada tahun 2022 berdasarkan SSGI, sehingga menempatkannya pada posisi keempat tertinggi bersama beberapa daerah lain seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Ngawi (Anwar, 2024). Angka tersebut tidak hanya jauh di atas rata-rata nasional, tetapi juga meningkat sekitar 7% dari tahun sebelumnya, menandakan kondisi gizi kronis yang perlu perhatian serius. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan menerapkan berbagai kebijakan percepatan penurunan stunting (USAID, 2022), salah satunya melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 yang menekankan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah desa, masyarakat, LSM, dan pihak swasta. Fokus utama program tersebut diarahkan pada intervensi gizi serta penguatan layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita guna mempercepat upaya pencegahan stunting di daerah ini.

Penanganan stunting di Kabupaten Lamongan dilakukan melalui identifikasi kasus dan intervensi yang terstruktur, dimulai dari pemantauan tumbuh kembang hingga pencegahan kasus baru untuk memastikan program yang lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis data ini terbukti efektif dengan capaian penurunan angka stunting menjadi 9,4% pada tahun 2023, melampaui target BKKBN (Portal.lamongankab.go.id, 2024). Keberhasilan tersebut turut didukung oleh penerapan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media,

termasuk dalam program peningkatan literasi gizi bagi ibu hamil dan anak usia dini (Ali et al., 2022). Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan penerapan prinsip *Dynamic Governance* yang mendorong tata kelola publik yang adaptif dan responsif dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam menurunkan angka stunting memperoleh pengakuan nasional melalui penghargaan Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 dari BKKBN serta *Public Government Award* 2024 kategori Best Progress in Reducing Stunting dari CNN Indonesia (Diskominfo Jatim, 2024; CNN, 2024), bahkan disertai pemberian insentif fiskal sebesar 6 miliar dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Diskominfo Jatim, 2024). Capaian ini mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah, mengingat sebelumnya penanganan stunting lebih bersifat sektoral dan administratif, sementara persoalannya mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan perilaku. Oleh karena itu, kesuksesan Lamongan menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural sebagaimana dalam konsep *Good Governance*, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi, pembelajaran, serta respons cepat terhadap dinamika lapangan, sejalan dengan prinsip *Dynamic Governance*.

Pendekatan *Dynamic Governance* memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tidak sekadar melaksanakan program sesuai ketentuan formal, tetapi juga menyesuaikan strategi secara adaptif dengan dinamika lokal. Dalam konteks percepatan penurunan stunting, pendekatan ini tampak melalui pemutakhiran data kesehatan anak, optimalisasi distribusi sumber daya, serta sinergi berbagai pemangku kepentingan. *Dynamic Governance* menekankan kebijakan yang bersifat proaktif, bukan hanya reaktif, dengan tiga kapabilitas inti: *Thinking Ahead*, *Thinking Again*, dan *Thinking Across* yang mencakup kemampuan mengantisipasi perubahan, mengevaluasi serta menyesuaikan kebijakan secara berkelanjutan, dan mengadopsi praktik terbaik lintas sektor maupun wilayah (Neo & Chen, 2007). Implementasi ketiga kapabilitas ini terlihat dari

konsistensi penggunaan data, pelaksanaan evaluasi rutin, pelibatan masyarakat, hingga adaptasi program nasional seperti PMT dan “1-10-100” agar sesuai kebutuhan lokal.

Ciri penting dari *Dynamic Governance* adalah penekanan pada evaluasi berkelanjutan dan perbaikan kebijakan, sebagaimana terlihat di Kabupaten Lamongan melalui evaluasi tahunan, analisis data lintas sektor, dan keterbukaan terhadap berbagai masukan untuk memastikan program tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah belajar dari praktik empiris sehingga kebijakan berjalan lebih responsif dan berkelanjutan. Namun demikian, penerapan *Dynamic Governance* dalam percepatan pencegahan stunting di Lamongan masih minim kajian akademik, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis implementasi kapabilitas *Dynamic Governance*, faktor pendorong keberhasilannya, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam proses tersebut melalui studi berjudul “Implementasi *Dynamic Governance* sebagai Inovasi Tata Kelola dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Lamongan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam penerapan *Dynamic Governance* dalam percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan. Informan dipilih melalui *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut paling memahami dan terlibat langsung dalam isu stunting (Moleong, 2021). Informan penelitian meliputi pejabat atau staf bagian stunting di Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas PPKB, Bappeda Kabupaten Lamongan, serta Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan *Constant Comparative Method*, yaitu *Constant Comparative Method* yang

menekankan proses membandingkan data secara berkelanjutan melalui reduksi, kategorisasi, sintesis, dan penyusunan hipotesis kerja (Glaser & Strauss dalam Neo & Chen, 2007:288). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode serta *member check* untuk memastikan konsistensi temuan dengan kondisi lapangan sehingga data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 2021).

PEMBAHASAN

Thinking Ahead

Penetapan Target Penurunan Prevalensi Stunting Jangka Menengah dan Panjang

Penerapan prinsip *Thinking Ahead* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan tercermin dari penetapan target berbasis visi jangka panjang dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan, selaras dengan konsep *Dynamic Governance* menurut Neo & Chen (2007). Target penurunan prevalensi dalam RPJMD 2021–2026 yang menetapkan angka 14% pada 2024 justru tercapai lebih cepat dengan capaian 27,05% (2022), turun menjadi 9,04% (2023) dan 6,9% (2024). Keberhasilan ini sejalan dengan *Stunting Convergence Management Framework* yang menekankan sinkronisasi pusat–daerah, kejelasan sasaran, dan konsistensi lintas sektor (Prasetyo et al., 2023), serta diperkuat oleh temuan Hertati et al. (2025) bahwa penerapan *Dynamic Governance* melalui evaluasi berkala dan integrasi data mampu menurunkan stunting signifikan seperti di Kabupaten Mojokerto. Strategi Lamongan juga bersifat data-driven melalui pemanfaatan SSGI, e-PPGBM, dan Bulan Timbang untuk memastikan kebijakan bersifat preventif dan adaptif, bukan sekadar reaktif.

Selain itu, keberlanjutan strategi *Thinking Ahead* tercermin dalam penyesuaian regulatif seperti Perbup No. 7 Tahun 2019 yang diperbarui menjadi Perbup No. 60 Tahun 2023 sebagai bentuk adaptasi kebijakan terhadap dinamika capaian lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Goi et al. (2025) bahwa kebijakan kesehatan efektif tidak hanya menetapkan

target, tetapi juga menginstitutionalisasikannya dalam tata kelola lintas sektor. Meski demikian, tantangan keberlanjutan program tetap ada, terutama saat pergantian kepemimpinan daerah sehingga penguatan peran TPPS, Bappeda, dan Pemerintah Desa menjadi krusial untuk menjaga konsistensi arah kebijakan lintas periode (Prasetyo et al., 2023; Goi et al., 2025). Dengan demikian, *Thinking Ahead* di Lamongan terlihat melalui penetapan target visi jangka panjang, integrasi dalam dokumen perencanaan, capaian berbasis evaluasi data, dan kolaborasi lintas sektor yang memastikan penurunan stunting menjadi agenda pembangunan manusia berkelanjutan, bukan sekadar program jangka pendek.

Pemanfaatan Data untuk Pemetaan Risiko dan Penentuan Prioritas Intervensi

Pemanfaatan data dalam penentuan prioritas intervensi stunting di Kabupaten Lamongan menunjukkan penerapan prinsip *Thinking Ahead* dalam *Dynamic Governance*, di mana pemerintah menggunakan informasi secara sistematis untuk mengantisipasi kondisi masa depan sesuai konsep Neo & Chen (2007). Integrasi data SSGI sebagai indikator makro, e-PPGBM sebagai data mikro individu, dan SIGA BKKBN untuk pemetaan keluarga berisiko menghasilkan peta risiko yang komprehensif sehingga kebijakan disusun berbasis *evidence-based policy* dan berorientasi antisipatif. Temuan ini sejalan dengan Adityaningrum et al. (2023) yang menjelaskan bahwa SSGI diperlukan untuk pemetaan wilayah rawan dan e-PPGBM memungkinkan deteksi dini secara real-time, serta selaras dengan Rohmatulloh et al. (2025) yang menegaskan bahwa konvergensi data antar sektor meningkatkan ketepatan intervensi. Praktiknya di Lamongan tampak melalui pemanfaatan data dalam penyusunan RKPD, penetapan desa prioritas, dan pengalokasian minimal 7% Dana Desa untuk pencegahan stunting, menunjukkan bahwa data berperan langsung dalam perencanaan dan anggaran.

Lebih jauh, pemanfaatan data di Lamongan mencerminkan mekanisme pembelajaran kebijakan berkelanjutan melalui evaluasi periodik untuk

menilai tren kasus dan menyesuaikan intervensi seperti PMT lokal, pendampingan 1000 HPK, serta edukasi gizi agar lebih tepat sasaran. Meski demikian, tantangan masih terdapat pada kapasitas analisis di tingkat puskesmas dan desa sehingga penguatan SDM pengelola e-PPGBM dan perangkat desa menjadi penting agar data tidak berhenti sebagai laporan administratif. Dengan demikian, implementasi *Thinking Ahead* di Lamongan tampak nyata karena data digunakan untuk memprediksi risiko, mengarahkan intervensi, mengalokasikan sumber daya, serta menyesuaikan strategi kesehatan secara adaptif dan berbasis bukti.

Penyusunan Program Preventif untuk Mengatasi Potensi Masalah

Penerapan prinsip *Thinking Ahead* di Kabupaten Lamongan terlihat melalui fokus pada pencegahan jangka panjang yang dimulai dari remaja putri hingga sebelum kehamilan, selaras dengan konsep pemerintahan dinamis berorientasi pencegahan menurut Neo & Chen (2007). Pemerintah menjalankan program pemberian TTD, edukasi anemia, dan penguatan Posyandu Remaja, sejalan dengan temuan Putri & Andriani (2022) bahwa konsumsi TTD rutin meningkatkan hemoglobin dan menurunkan risiko anemia sehingga membantu mencegah stunting sejak tahap hulu. Selain itu, edukasi calon pengantin dilaksanakan secara kolaboratif untuk meningkatkan literasi gizi dan kesiapan kehamilan, sejalan dengan Amalia & Handayani (2021) yang menegaskan efektivitas edukasi pranikah dalam mencegah faktor risiko kehamilan terkait stunting.

Selanjutnya, penguatan program 1.000 HPK melalui kelas ibu hamil, PMT pangan lokal, pemantauan tumbuh kembang, dan konseling pola asuh menunjukkan strategi antisipatif yang mendukung temuan Hidayati & Nurjanah (2023) bahwa intervensi pada periode tersebut berpengaruh signifikan terhadap penurunan risiko stunting. Di tingkat desa, program 1–10–100 TP PKK dan DASHAT memperkuat literasi pengasuhan, pemantauan gizi, serta kebiasaan pangan lokal bergizi pada keluarga berisiko. Dengan demikian, Lamongan menerapkan *Thinking Ahead* secara komprehensif

melalui intervensi remaja, edukasi pranikah, fokus 1.000 HPK, pelibatan kader, dan penguatan pangan lokal, sehingga pencegahan stunting bersifat antisipatif, berkelanjutan, dan terarah pada pembangunan kesehatan jangka panjang.

Thinking Again

Pelaksanaan Evaluasi Rutin Secara Berkala dan Berjenjang

Pelaksanaan evaluasi berjenjang di Kabupaten Lamongan menunjukkan penerapan prinsip *Thinking Again* dalam kerangka *Dynamic Governance*, di mana pemerintah secara konsisten melakukan refleksi dan penyesuaian strategi berdasarkan pengalaman pelaksanaan (Neo & Chen, 2007). Evaluasi dilakukan mulai dari monitoring di posyandu dan puskesmas, rapat koordinasi TPPS kecamatan triwulanan, hingga forum Rembuk Stunting tingkat kabupaten. Sistem evaluasi ini tidak hanya berfokus pada capaian angka, tetapi juga pada efektivitas program, integrasi lintas sektor, dan sinkronisasi data melalui e-PPGBM, SSGI, serta pelaporan desa. Pola ini sejalan dengan temuan Kurniawati dan Lestari (2024) bahwa evaluasi berjenjang berperan penting dalam menghasilkan umpan balik strategis, serta pandangan Supartiningsih (2023) mengenai peran Rembuk Stunting sebagai ruang konsolidasi kebijakan berbasis data. Selain itu, kolaborasi antara TPPS Kabupaten, Bappeda, Dinas PMD, PKK, dan desa mencerminkan pendekatan multipihak sebagaimana ditekankan oleh Handayani (2025) dalam penanganan stunting yang bersifat multidimensional.

Hasil evaluasi di Lamongan kemudian diterjemahkan menjadi langkah korektif yang nyata, seperti penguatan PMT lokal, peningkatan pendampingan keluarga berisiko, serta pengalihan intervensi ke wilayah dengan tren kasus tinggi. Tidak berhenti pada pelaporan administratif, evaluasi ini menjadi sarana *policy learning* yang berjalan dari tingkat desa melalui mekanisme Musyawarah Desa Evaluatif hingga kabupaten, sehingga terbentuk siklus pembelajaran kebijakan secara *bottom-up*. Dengan

demikian, pemerintah daerah tidak terpaku pada rencana awal, melainkan terbuka terhadap refleksi dan penyesuaian berbasis kondisi lapangan, menunjukkan karakter pemerintahan yang adaptif, reflektif, dan dinamis sesuai konsep *Dynamic Governance*.

Penyesuaian Kebijakan atau Program Berdasarkan Hasil Evaluasi

Penerapan prinsip *Thinking Again* dalam *Dynamic Governance* di Kabupaten Lamongan terlihat dari bagaimana pemerintah menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Neo dan Chen (2007) menegaskan bahwa organisasi publik yang dinamis harus mampu belajar dari pelaksanaan kebijakannya sendiri, sehingga evaluasi menjadi landasan perubahan strategi, bukan sekadar penilaian formal. Di Lamongan, hasil monitoring triwulanan TPPS, supervisi lapangan, dan Rembuk Stunting Tahunan dimanfaatkan untuk menyusun kembali RAD Stunting dan RKPD, menunjukkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika lapangan. Temuan ini sejalan dengan Kurniawati dan Lestari (2024) yang menekankan pentingnya integrasi hasil evaluasi dalam siklus perencanaan tahunan sebagai bagian dari *policy feedback cycle*. Penekanan pada penyesuaian program, seperti perbaikan cakupan TTD bagi remaja putri melalui kolaborasi lintas dinas, memperlihatkan bahwa perubahan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi diterjemahkan dalam langkah lapangan yang nyata. Supartiningsih (2023) juga menegaskan peran Rembuk Stunting dalam memastikan dukungan fiskal desa selaras dengan prioritas kabupaten, termasuk penguatan alokasi Dana Desa minimal 7% untuk stunting.

Selain itu, penyesuaian kebijakan di Lamongan juga menyentuh aspek koordinasi lintas sektor, di mana pemerintah memperluas kolaborasi tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pertanian, pendidikan, dan pemberdayaan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari kompleksitas isu stunting dan perlunya pendekatan multipihak, sebagaimana dikemukakan Handayani (2025) bahwa perubahan pola

koordinasi antar-sektor merupakan indikator berjalannya proses refleksi kebijakan. Adaptasi hingga tingkat desa melalui Musyawarah Desa Evaluatif turut membentuk budaya *policy learning* dari bawah, memastikan program lebih tepat sasaran sesuai kondisi lokal. Dengan demikian, proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan di Kabupaten Lamongan mencerminkan praktik pemerintahan yang adaptif, reflektif, dan konsisten dengan konsep *learning government* dan *adaptive governance*

Tindak Lanjut Sistematis atas Hambatan Program

Penerapan prinsip Thinking Again dalam *Dynamic Governance* di Kabupaten Lamongan tercermin dari tindak lanjut sistematis terhadap hambatan pelaksanaan program. Sesuai pandangan Neo dan Chen (2007), Thinking Again menuntut kemampuan organisasi publik untuk mengubah hasil evaluasi menjadi strategi korektif, bukan hanya menilai capaian. Hal ini terlihat dari penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pasca-Rembuk Stunting dan rapat TPPS yang memuat identifikasi masalah, penanggung jawab, langkah perbaikan, serta tenggat waktu pelaksanaan. Mekanisme RTL tersebut memastikan evaluasi menghasilkan aksi nyata, sebagaimana ditegaskan Supartiningsih (2023) bahwa RTL membedakan evaluasi substantif dari sekadar seremoni administrasi. Contohnya, Lamongan memperbaiki ketidaksesuaian data e-PPGBM melalui validasi lapangan, pelatihan input digital, dan tim verifikasi antarpuskesmas, sejalan dengan Priyanto (2023) bahwa tindak lanjut harus memperkuat proses, bukan hanya angka. Inovasi edukasi seperti Feranek dan *peer educator* untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD remaja putri juga mencerminkan pendekatan *adaptive governance* yang disesuaikan dengan umpan balik sosial.

Selain perbaikan teknis, tindak lanjut di Lamongan juga berfokus pada penguatan kapasitas pelaksana dan tata kelola kelembagaan. Pemerintah melakukan *refreshment training* bagi kader dan TPK menggunakan modul berbasis kondisi lapangan, selaras dengan Handayani (2025) yang

menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aktor lokal untuk keberlanjutan intervensi. Koordinasi lintas sektor turut diperkuat melalui peran TPPS sebagai *clearing house* agar intervensi OPD tidak berjalan sektoral, melainkan terarah pada keluarga dan desa prioritas. Dengan demikian, pola tindak lanjut di Lamongan menunjukkan proses *continuous policy learning* yang mampu mengidentifikasi hambatan, menetapkan koreksi, membagi tanggung jawab, dan memastikan monitoring berkelanjutan. Proses ini mencerminkan internalisasi prinsip Thinking Again yang reflektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

Thinking Across

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lintas Sektor

Penerapan prinsip *Thinking Across* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan terlihat dari kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi lintas sektor secara sistematis. Neo dan Chen (2007) menegaskan bahwa *Thinking Across* mendorong organisasi publik untuk membuka ruang koordinasi dengan berbagai aktor guna menangani isu yang kompleks. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan TPPS sebagai forum koordinasi antar-OPD agar intervensi gizi spesifik dan sensitif berjalan terarah dan saling melengkapi, sejalan dengan temuan Sasmito & Nuhung (2024) bahwa keselarasan strategi lintas sektor menjadi kunci efektivitas penurunan stunting. Di tingkat desa, kolaborasi diperkuat melalui TPPS Desa, program Dashat, dan gerakan 1-10-100 PKK, selaras dengan Handayani (2025) yang menekankan bahwa kolaborasi efektif melibatkan pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan elemen masyarakat. Hal ini juga konsisten dengan kajian Febriana & Hertati (2023) yang menegaskan perlunya penguatan kolaborasi multipihak serta temuan Mukaromah & Al Fatta (2025) di Banyuwangi mengenai keberhasilan *collaborative governance* melalui peran desa dan sinergi dalam kerangka *pentahelix*.

Selain penguatan lintas sektor internal, Lamongan juga mendorong kemitraan eksternal seperti dengan USAID ERAT/Bank Dunia untuk

memperkuat kapasitas teknis TPPS dan memastikan keberlanjutan koordinasi meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Pola ini sejalan dengan konsep kolaborasi hibrid Supartiningsih (2023), bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh dukungan finansial, tetapi juga penguatan jejaring dan transfer pengetahuan. Dengan demikian, kolaborasi di Lamongan mencerminkan tata kelola yang koordinatif, konsolidatif, dan adaptif, di mana TPPS menjadi pusat penyelarasan strategi, desa menjadi ruang implementasi responsif, dan mitra eksternal memperkuat kapasitas sistem. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Thinking Across* tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga modal kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan kebijakan dalam percepatan penurunan stunting.

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Multipihak

Penerapan prinsip *Thinking Across* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamongan terlihat dari kemampuan pemerintah mengintegrasikan sumber daya lintas aktor, mulai dari pemerintah daerah, desa, masyarakat, hingga mitra pembangunan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Neo dan Chen (2007) bahwa *networked governance* menuntut organisasi untuk melampaui batas sektoral. Praktik tersebut tampak melalui optimalisasi minimal 7% Dana Desa untuk program Dashat, penyediaan PMT berbasis pangan lokal, edukasi keluarga, serta pelatihan kader, sehingga desa berperan sebagai aktor utama dalam pencegahan stunting. Pendekatan ini selaras dengan temuan Rafidah & Ismail (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada kapasitas desa dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Di sisi lain, kolaborasi dengan mitra seperti USAID ERAT/Bank Dunia berfungsi memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pelatihan TPPS, penyusunan rencana aksi, dan penguatan monitoring, sesuai dengan pandangan Handayani (2025) bahwa pendampingan mitra menjaga keberlanjutan kebijakan, terutama saat anggaran terbatas.

Optimalisasi peran masyarakat dan aktor pendukung juga terlihat melalui pemberdayaan kader PKK, Tim Pendamping Keluarga, penyuluh pertanian dan perikanan, serta UMKM lokal dalam mendampingi keluarga berisiko, menyediakan pangan bergizi, dan meningkatkan literasi gizi. Hal ini konsisten dengan Rahmawati et al. (2024) yang menegaskan bahwa konvergensi penurunan stunting efektif ketika masyarakat berperan sebagai pelaku aktif. Secara keseluruhan, Lamongan menunjukkan integrasi pendanaan campuran dari APBD, Dana Desa, mitra pembangunan, serta organisasi profesi, didukung penguatan kapital sosial melalui peran kader dan tokoh lokal serta kelembagaan kolaboratif TPPS untuk menyelaraskan perencanaan dan monitoring. Dengan demikian, Kabupaten Lamongan telah menginternalisasi prinsip *Thinking Across* melalui pembentukan ekosistem kolaboratif yang kuat dan berkelanjutan, mencerminkan tata kelola kolaboratif yang adaptif dan terarah menuju tujuan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Dynamic Governance* dalam percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan telah berjalan efektif melalui tiga kapabilitas utama. Pertama, *Thinking Ahead* diimplementasikan melalui penetapan target penurunan stunting yang terukur dan berbasis pemanfaatan data lintas sektor seperti SSGI, e-PPGBM, dan SIGA untuk memetakan keluarga serta desa berisiko, yang diperkuat oleh program preventif sejak hulu seperti pemberian Tablet Tambah Darah bagi remaja putri, edukasi calon pengantin, posyandu remaja, program 1-10-100 PKK, serta pengembangan Desa Siaga Stunting. Kedua, *Thinking Again* tercermin dalam mekanisme evaluasi berjenjang dari tingkat posyandu hingga kabupaten, yang menghasilkan penyesuaian strategi berbasis temuan lapangan, termasuk penyempurnaan mekanisme PMT, penguatan edukasi gizi, peningkatan kapasitas kader dan Tim Pendamping Keluarga, serta supervisi lapangan terpadu sehingga kebijakan tetap adaptif.

Ketiga, *Thinking Across* diwujudkan melalui kolaborasi multipihak yang terstruktur melalui TPPS, dengan melibatkan perangkat daerah, puskesmas, pemerintah desa, PKK, UMKM lokal, akademisi, tokoh masyarakat, dan mitra pembangunan, serta dukungan alokasi minimal 7% Dana Desa untuk intervensi pencegahan stunting. Meskipun demikian, masih ditemukan tantangan berupa kapasitas analisis data di tingkat desa yang belum merata, keberlanjutan pendampingan keluarga yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang belum konsisten. Sehingga,

diperlukan penguatan kapasitas teknis pengelolaan data di tingkat desa, percepatan siklus evaluasi di wilayah berisiko tinggi, pengintegrasian program dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, intensifikasi edukasi gizi dan pola asuh berbasis keluarga, serta pemerataan kualitas koordinasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan capaian penurunan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningrum, A., Arsad, N., Jusuf, H., Statistika, D., Matematika, J., Adityaningrum, A., Arsad, N., Jusuf, H., Statistika, D., Matematika, J., Gorontalo, U. N., Masyarakat, J. K., & Gorontalo, U. N. (2023). *Faktor Penyebab Stunting Di Indonesia : Analisis Data Sekunder Data Ssgi Tahun 2021 Factors Causing Stunting In Indonesia : 2021 Ssgi Secondary Data*. 3(1), 1–10.
- Anwar, H. (2024). *Stunting Turun Drastis dari 27,05% Jadi 9,4%, Lamongan Diganjar Penghargaan BKKBN!* *Www.Barometerjatim.Com*. <https://www.barometerjatim.com/news-9585-stunting-turun-drastis-dari-2705-jadi-94-lamongan-diganjar-penghargaan-bkkbn>
- Azaria, F. (2023). *Analisis Penerapan Konsep Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Mpp) Di Kota Magelang*. Universitas Tidar.
- BKKBN: *Penurunan stunting 2023 belum menggembirakan, di bawah target*. (2024). <https://www.antaranews.com/berita/4042386/bkkbn-penurunan-stunting-2023-belum-menggembirakan-di-bawah-target>
- CNN. (2024). *Pemkab Lamongan Dianugerahi Best Progress in Reducing Stunting*. *Www.Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240924110435-25-1147619/pemkab-lamongan-dianugerahi-best-progress-in-reducing-stunting>
- Dikominfo Jatim. (2024). *Berhasil Turunkan Stunting, Lamongan Dapat Apresiasi dari Wapres RI*. *Kominfo.Jatimprov.Go.Id*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/berhasil-turunkan-stunting-lamongan-dapat-apresiasi-dari-wapres-ri#:~:text=Dijelaskan oleh Abdul Rouf%2C Kabupaten,menduduki angka stunting 27%2C05>
- Febriana, N., & Hertati, D. (2023). Penanggulangan stunting dalam perspektif collaborative governance. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(2), 625–633. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>
- Goi, M., Salmah, A. U., Jafar, N., Ilham, A. A., Stang, S., Safar, M., & Mallongi, A. (2025). Cross- Sector Collaboration in Addressing Stunting in

- Indonesia. *Pharmacognosy Journal*, 16(6), 1424–1430.
<https://doi.org/10.5530/pj.2024.16.229>
- Handayani, B., & Arianto, B. (2022). Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Tata Kelola Dana Desa. *Jurnal DIALOGIKA: Manajemen Dan Administrasi*, 3(2), 59–72.
<https://doi.org/10.31949/dialogika.v3i2.7544>
- Haskas, Y. (2020). Gambaran Stunting Di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 15(2), 2302–2531.
- Hertati, D., Arundinasari, I., & Tukiman. (2025). Dynamic governance in overcoming stunting Mojokerto Regency. *NST Proceedings, 9th International Seminar of Research Month 2024*, 718–724.
<https://doi.org/10.11594/nstp.2025.47107>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mukaromah, S., & Al Fatta, M. N. (2025). Collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyuwangi. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik dan Manajemen Publik*, 5(1), 20–29.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance Embedding Culture, Capabilities, and Change In Singapore*. World Scientific Publishing Co. PTe.Ltd.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
- Portal.lamongankab.go.id. (2024). *Angka Stunting Lamongan Turun Drastis, Lampau Target BKKBN*. <https://Portal.Lamongankab.Go.Id/>.
[https://portal.lamongankab.go.id/posting/14802#:~:text=Angka Stunting Lamongan Turun Drastis%2C Lampau Target BKKBN,-Berita 27 April&text=Sempat menduduki angka stunting 27,Survei Kesehatan Indonesia \(SKI\)](https://portal.lamongankab.go.id/posting/14802#:~:text=Angka Stunting Lamongan Turun Drastis%2C Lampau Target BKKBN,-Berita 27 April&text=Sempat menduduki angka stunting 27,Survei Kesehatan Indonesia (SKI)).
- Prasetyo, A., Noviana, N., Rosdiana, W., Anwar, M. A., Hartiningsih, Hendrixon, Harwijayanti, B. P., & Fahlevi, M. (2023). Stunting Convergence Management Framework through System Integration Based on Regional Service Governance. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15031821>
- Rohmatulloh, I., Widhiarto, I., Siahaan, S. C., & Samudra, A. A. (2025). *Pengentasan Stunting Melalui Tata Kelola Kolaborasi antar Sektoral: Studi Kasus di Desa Sembalun Bumbung , Kecamatan Sembalun , Kabupaten Lombok Timur*. 7(5), 3690–3700.

- Sakti, A. S., Novitasari, L., Chalid, N., & Ambar, G. (2023). *Edukasi dan Sosialisasi tentang Pentingnya Mencegah Stunting pada Anak di Satuan PAUD Sejenis (SPS) Melati Putih Desa Parengan , Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan Education and Outreach about the Importance of Preventing Stunting in Children in the.* 2(1), 15–19.
- Shanti, H. D. (2022). *Kemenko PMK: RI peringkat 115 stunting tertinggi secara global.* Antaranews.Com.
<https://www.antaranews.com/berita/2876253/kemenko-pmk-ri-peringkat-115-stunting-tertinggi-secara-global>
- USAID. (2022). *Mengakselerasi Penurunan Stunting Melalui Kolaborasi Dengan Desa-desa Di Lamongan.* Www.Program-Erat.or.Id.
<https://www.program-erat.or.id/id/mengakselerasi-penurunan-stunting-melalui-kolaborasi-dengan-desa-desa-di-lamongan/>